

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* UII Pres, 2009, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung.
- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta,
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung
- Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000, hlm.1-2 dikutip dari Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, ANDI, Yogyakarta
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII Yogyakarta
- Bachrul Elmi, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik*. Cetakan Edisi Kedua, Fokusmedia, Bandung

Daeang Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Buku Wajib Kenotariatan, Pustaka Yustisia, 2012, Jakarta.

Dasman Djamiluddin, *Perkembangan Notaris Dunia dan Indonesia*, nomor 11.07, Renvoi, 2012, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

D. Siregar, 2004, *Manajemen Aset dan Strategi Penataan Konsep Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1992, Jakarta

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2008, Bandung.

..... *Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, 2009, Bandung.

-----, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, 2014, Bandung.

Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, Jakarta

Hestu B.Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, 2007, Medan.

Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbag Pressindo, Yogyakarta

HR Syaukani, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Notaris Raih Asa Sukses*, 2009, Jakarta.

Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Inu Kencana Syafei, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

J.B. Soesanto. 2013, *Hukum Agraria I*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rhineka Cipta, Jakarta

Mohammad Nashirruddin, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris*, 2015, *Jurnal Hukum UNBRAW*.

Mansour Fakhri, 2003, *landreform di desa dan penatagunaan tanah (dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, Rajawali Pers, Jakarta

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta Tanah*, Karya Media, Yogyakarta,

M. Yusuf, 2010, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Salemba Empat, Jakarta

R. Soegondo, *Hukum Notariat Indonesia*, Rajawali, 1982, Jakarta.

R. Joeniarso, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta.

Soehino, 1995, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sri Soedewi Maschun Syofwan, 2005, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta

Sri Soemantri dan Bintang R. Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 tahun kembali ke undang undang dasar 1945)*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Sarjita, 2005, *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tugu Jogja Pustaka. Yogyakarta

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Grup Cetakan Ke-2, Jakarta.

Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta

Umar Said, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Pres, Malang

Victor M. Situmorang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1998, *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)*, dalam Pro Justitia , Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung

Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Adminsitration Negara*, Penerbit Ghalia, Jakarta

Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

b. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terakhir saat ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pendaftaran tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu.

